

DAFTAR BACAAN

Buku – Buku

Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cet. 2, Total Media, Yogyakarta, 2008.

Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cet. 4, Citra Aditya, Bandung, 2014.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cet. 3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cet. 11, Djambatan, Jakarta, 1995.

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kie, Tan Thong, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cet. 1, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Kurniawan Rizki, *Hukum Kepailitan Penggantian Kurator Atas Usul Kreditur Konkuren*, Cet. 1, CV. Mega Press Nusantara, 2023.

_____, *Verzet Eksekusi*, Cet. 1, CV. Mega Press Nusantara, 2023.

Kusumaatmadja Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002.

Manik Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2012.

- Makaro Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 8, Kencana, Jakarta, 2013.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet. 6, Rajafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. 4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Muljadi, Kartini, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, Cet. 5, Alumni, Bandung, 2001.
- M.Zen A. Parta, *Perlindungan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik: Atas Harta Kekayaan dalam Perkara Pidana*, Cet. 1, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, *Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Saliman Abdul R, Ahmad Jalis, Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Cet. 1, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2004.
- Satrio J, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Setiawan, I Ketut Oka *Hukum Perikatan*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Cet. 4, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*,

Rajawali Grafindo Persada, 2010.

Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983.

Subhan M. Hadi, *Hukum Kepailitan*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008.

Suherman E, *Failissement (Kefailitan)*, Binacipta, Bandung, 1988.

Viswandro, *Kamus Istilah Hukum*, Cet. 1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.

Yani Ahmad, Gunawan Widjaja, *Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cet. 2, Ideas Publishing, Gorontalo, 2019.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Kurniawan Rizki, *Mekanisme Penggantian Kurator Atas Usul Kreditur Konkuren Dalam Praktek Peradilan Niaga*, Tesis, 2002.

Sianturi Agustina Ria Retta Imelda, *Perlindungan Kreditur Kepailitan Melalui Actio Pauliana*, Skripsi, 2013.

Jurnal Hukum

Ackbar Muhammad, *Pertanggungjawaban Debitor Pailit Terhadap Utang Yang Belum Terlunasi Dalam Perkara Kepailitan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Semaya, 2015.

Ariyadi I Gede Yudhi, *Mekanisme Permohonan Pernyataan Pailit Melalui Pengadilan Niaga*, Kertha Semaya, Vol. 5, No. 1, 2017.

Arkisman, *Pelaksanaan Tugas Kurator dalam Mengurus Harta Pailit berdasarkan Pasal 72 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Pro Hukum, Vol IV, Juni

2015.

Butarbutar Elisabeth Nurhaini, *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana*, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara, 2019.

H. Sujana et al., *Kajian Hukum Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Benda Bergerak*, Jember, 2013.

Kurniawan I Komang Indra, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Natuurlijke Persoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Semaya, 2015.

Laminullah Prayogha R, *Penerapan Lembaga Paksa Badan Terhadap Debitur Beritikad Tidak Jujur Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Hukum, 2017.

Satria Braja Hari Andja et al., *Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Pemohon Pailit Terhadap Penyelesaian Utang Piutang (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, Jurnal Hukum, Medan, 2020.

Suhardo Etty S, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan*, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, 2012.

Swari Ida Ayu Kade Winda, *Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditur Akibat Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan*, Fakultas Hukum Universitas Udaya, Kertha Semaya, 2014.

Wery P.L, *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*, Percetakan

Negara, Jakarta, 1990.

Media Daring

KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Bagia Nugraha, “9 Penyebab Pailit yang Bikin Sulit”, November 14, 2018, <https://bahasan.id/>, <https://bahasan.id/9-penyebab-pailit-yang-bikin-sulit/>.

Rivan Kurniawan, “Berkenalan Lebih Dekat Dengan Hutang”, Rivan kurniawan.com, April 17, 2021, <https://blog.rivankurniawan.com/2021/04/17/apa-itu-hutang/>.

Rizki Kurniawan, “*Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Menurut UU Nomor 4 Tahun 1998*”, rzkurniawan.wordpress.com, Oktober 4, 2019, <https://rzkurniawan.wordpress.com/2019/10/04/kepailitan-penundaan-kewajiban-pembayaran-hutang-menurut-uu-nomor-4-tahun-1998/>.

Artikel Kantor Pengacara Burs & Associates, *Prosedur Pengajuan Kepailitan*, Januari 4, 2023, <https://bursadvocates.com/prosedur-pengajuan-kepailitan/>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.